

PALIP KELAS XI AKL

1	Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut ...	
	A	Masyarakat
	B	Pihak internal
	C	Pihak eksternal
	D	Pemerintah desa
	E	Pemerintahan desa
2	Berdasarkan UU RI No.06 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa disebut ...	
	A	Masyarakat
	B	Pemerintahan desa
	C	Pemerintah desa
	D	Pihak eksternal
	E	Pihak internal
3	Berdasarkan PP RI No 43 Tahun 2015, semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut ...	
	A	Bendahara desa
	B	Sekretaris desa
	C	Kepala desa
	D	Kepala seksi
	E	Keuangan desa

4	Berdasarkan PP RI No. 43 Tahun 2015, uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB desa melalui rekening kas desa disebut ...	
	A	Pengeluaran desa
	B	Surplus anggaran
	C	SILPA
	D	Keuangan desa
	E	Penerimaan desa
5	Salah satu unsur Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dan memiliki tugas mengendalikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa adalah ...	
	A	Kepala seksi
	B	Kepala desa
	C	Bendahara desa
	D	Sekretaris desa
	E	Pendapatan desa
6	Salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan desa memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa adalah ...	
	A	Kepala desa
	B	Bendahara desa
	C	Sekretaris desa
	D	Pendapatan desa
	E	Kepala seksi
7	Semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa disebut ...	
	A	Alokasi dana desa

	B	Anggaran pendapatan desa
	C	Anggaran belanja desa
	D	Pendapatan desa
	E	Dana transfer desa
8	Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut ...	
	A	Pendapatan desa
	B	Pendapatan transfer desa
	C	Anggaran pendapatan
	D	Alokasi dana desa
	E	Anggaran belanja
9	Bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa merupakan bantuan keuangan ...	
	A	Bagi hasil usaha
	B	Bersifat umum
	C	Pemerintahan provinsi/kabupaten/desa
	D	Alokasi dana desa
	E	Pajak dan retribusi
10	Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa disebut ...	
	A	Belanja desa
	B	Belanja pegawai
	C	Keuangan desa
	D	Pembiayaan desa
	E	Pengeluaran pembiayaan

11	Di bawah ini merupakan Sumber pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, ...	
	A	Pemerintah
	B	Pendapatan asli desa
	C	Pihak internal
	D	Pihak eksternal
	E	BPD
12	Di bawah ini pihak yang membutuhkan informasi akuntansi keuangan desa, kecuali...	
	A	Pihak internal
	B	Pihak eksternal
	C	BPD
	D	Pemerintah
	E	Masyarakat
13	Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, disebut ...	
	A	Alokasi dana desa
	B	Pembiayaan desa
	C	Pendapatan desa
	D	Bantuan keuangan
	E	APB Desa
14	Rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa, merupakan pengertian dari ...	
	A	Alokasi dana desa
	B	Pembiayaan desa
	C	APB Desa

	D	Pendapatan desa
	E	Bantuan keuangan
15	Kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa merupakan pengertian dari ...	
	A	Penatausahaan penerimaan desa
	B	Penatausahaan belanja desa
	C	Penatausahaan pembiayaan desa
	D	Penatausahaan keuangan desa
	E	Dokumen penatausahaan oleh bendahara desa
16	Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah disebut...	
	A	Akuntansi daerah
	B	Keuangan daerah
	C	Aset daerah
	D	Kekayaan daerah
	E	Rencana kerja
17	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah disebut...	
	A	Pengelolaan akuntansi daerah
	B	Pengelolaan keuangan daerah
	C	Pengelolaan kekayaan daerah
	D	Rencana kegiatan kerja
	E	Program kegiatan kerja
18	Peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota disebut juga dengan...	
	A	Peraturan kepala daerah

	B	Peraturan pusat
	C	Peraturan Undang-Undang
	D	Peraturan kepala negara
	E	Peraturan kepala instansi
19	Dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh (20) tahun disebut dengan ...	
	A	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	B	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
	C	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
	D	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	E	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
20	Dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahun disebut ...	
	A	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
	B	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
	C	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	D	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	E	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
21	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun	
	A	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
	B	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	C	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
	D	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
	E	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
22	Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang disebut ...	
	A	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

	B	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	C	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
	D	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	E	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
23	Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah disebut ...	
	A	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	B	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
	C	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	D	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
	E	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
24	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	
	A	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	B	Kebijakan Umum APBD
	C	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
	D	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	E	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
25	Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut ...	
	A	Kebijakan Umum APBD
	B	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	C	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
	D	Prioritas dan Plafon Anggaran Tetap (PPAT)
	E	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
26	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut ...	

	A	Pendapatan Negara
	B	Pengeluaran daerah
	C	Pemasukan daerah
	D	Pendapatan daerah
	E	Pembiayaan
27	Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut ...	
	A	Pendapatan Negara
	B	Pengeluaran daerah
	C	Pemasukan daerah
	D	Pendapatan daerah
	E	Pembiayaan
28	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program, dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD disebut ...	
	A	RKA-SKPD
	B	RKA-PPKD
	C	Kuasa BUD
	D	KU APBD
	E	SKP Daerah
29	Fungsi APBD yang merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan disebut ...	
	A	Fungsi pengawasan
	B	Fungsi otorisasi
	C	Fungsi perencanaan
	D	Fungsi alokasi
	E	Fungsi distribusi

30	Proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan disebut ..	
	A	Pelaksanaan APBD
	B	Pertanggungjawaban APBD
	C	Pengawasan APBD
	D	Pelaksanaan pendapatan
	E	Penyusunan APBD